



Militerisasi Pulau Buatan di Laut China Selatan oleh Tiongkok: Implikasi terhadap Keamanan Maritim Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara

Andi Alya Khairunnisa^{1*}, Agussalim Burhanuddin²

^{1,2} Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea Indah, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245

Korespondensi penulis: andialyakhairunnisaaa@email.com*

Abstract: *The South China Sea is a strategic water area connecting East Asia, the Pacific Ocean, and the Indian Ocean, and is the main route for around 30 percent of international trade shipping. This area is also rich in energy resources, such as natural gas and petroleum. However, in recent decades, the South China Sea has become the center of territorial disputes due to unilateral maritime claims by China through the Nine Dash Line principle which covers up to 90 percent and is contrary to the Law of the Sea. China even builds artificial islands equipped with military infrastructure, which increases tensions in the region. Through the approach of the realism paradigm, as well as the theory of complex regional security and maritime security as well as literature analysis, this article discusses the implications of China's artificial island construction on maritime security in Southeast Asia, especially for countries such as Vietnam, the Philippines, Malaysia, and Brunei Darussalam. This article emphasizes that China's actions have implications that greatly disrupt the stability of maritime security for countries in the region located in the South China Sea waters.*

Keywords: *China's Militarization; Maritime Security Implications; South China Sea; Southeast Asia*

Abstrak. Laut China Selatan merupakan wilayah perairan strategis yang menghubungkan Asia Timur, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia, serta menjadi jalur utama bagi sekitar 30 persen pelayaran perdagangan internasional. Kawasan ini juga kaya akan sumber daya energi, seperti gas alam dan minyak bumi. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Laut China Selatan menjadi pusat sengketa wilayah akibat klaim maritim sepihak oleh Tiongkok melalui prinsip *Nine Dash Line* yang mencakup hingga 90 persen dan bertentangan dengan Hukum Laut. Tiongkok bahkan membangun pulau-pulau buatan yang dilengkapi infrastruktur militer, yang meningkatkan ketegangan di kawasan. Melalui pendekatan paradigma realisme, serta teori keamanan regional kompleks dan keamanan maritim juga analisis pustaka, artikel ini membahas implikasi pembangunan pulau buatan Tiongkok terhadap keamanan maritim di Asia Tenggara, khususnya bagi negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Artikel ini menekankan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok memberikan implikasi yang sangat mengganggu stabilitas keamanan maritim bagi negara-negara kawasan yang berada di wilayah perairan Laut China Selatan.

Kata kunci: Asia Tenggara; Implikasi Keamanan Maritim; Laut China Selatan; Militerisasi Tiongkok

1. LATAR BELAKANG

Laut China Selatan adalah perairan yang membentang beberapa negara Asia Tenggara dan menghubungkan Asia Timur, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. (Aulia, Putra, et al., 2023). Laut China Selatan dianggap strategis karena merupakan jalur pelayaran untuk sebagian besar komoditas dan barang global, termasuk barang-barang industri dan minyak mentah, serta merupakan rute perdagangan internasional yang signifikan untuk 30 persen pelayaran global. (Wicaksono, et al., 2024). Laut China Selatan juga kaya akan sumber daya bawah laut, termasuk minyak, gas alam, dan sumber energi hidrokarbon dalam jumlah besar, yang

semuanya jelas menguntungkan dari sudut pandang ekonomi. (Valencia, 2017). Namun, perselisihan geopolitik dan perselisihan hak kedaulatan antara berbagai negara, khususnya dalam beberapa dekade terakhir. (Ramon, 2022).

Negara-negara di kawasan ini kali pertama berselisih mengenai klaim kedaulatan teritorial pada tahun 1974, yang menandai dimulainya sengketa Laut China Selatan. Tiongkok memicu sengketa pada sejumlah perairan dengan memanfaatkan Prinsip *Nine Dash Line* yang ditetapkan sebagai dasar untuk menegaskan hak maritim dan kedaulatan regional tanpa persetujuan hukum internasional. Perlakuan Tiongkok dalam menegaskan hak maritimnya atas 90 persen Laut China Selatan merupakan salah satu contoh penerapan Prinsip *Nine Dash Line*. (Bolkiah & Usni, 2023). Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNCLOS, yang menetapkan batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada tahun 1982 merupakan sekumpulan peraturan hukum maritim yang dilanggar oleh klaim sepihak oleh Tiongkok. (Ramon, 2022). Meskipun demikian, Tiongkok belum menerima sistem hukum UNCLOS. Lebih jauh, klaim Tiongkok memiliki dasar sejarah yang sudah ada sejak tahun 1947 dengan dua pulau yang termasuk dalam wilayah kedaulatannya. Tiongkok pada saat itu menerbitkan peta yang menguraikan klaim kedaulatannya. Hal ini masih menjadi dasar bagi Prinsip *Nine Dash Line*. (Goh, 2005)

Tujuh pulau buatan, termasuk Fiery Cross Reef, Hughes Reef, Subi Reef, Mischief Reef, Cuarteron Reef, Gaven Reef, dan Johnson Reef, telah dibangun oleh Tiongkok secara langsung di Laut China Selatan antara tahun 2014 hingga 2016. Tiongkok secara implisit telah menunjukkan keseriusan klaim teritorialnya di Laut China Selatan. Akan tetapi, Tiongkok telah menunjukkan keseriusannya dalam menegaskan klaimnya di Laut China Selatan tidak hanya dengan menggunakan taktik ini, tetapi juga dengan menjalankan kebijakan luar negeri yang tegas. Peningkatan pengawasan militerisasi merupakan salah satu contoh upaya militerisasi yang dilakukan di pulau-pulau buatan di Laut China Selatan (Khairulsaah, 2025). Tiongkok di Laut China Selatan dalam tiga dari tujuh pulau buatan yang dibangunnya, diantaranya diketahui memiliki instalasi militer. Senjata seperti jet tempur, sistem rudal, anti-kapal, dan anti-pesawat, serta peralatan laser. Tujuan dari instalasi militer Tiongkok adalah untuk memperluas dominasi dan otoritasnya di Laut China Selatan. (Darmawan & Ardhaneswari, 2024).

Selain infrastruktur dan logistik militer yang rumit di tiga pulau buatan tersebut, Tiongkok juga berupaya memperkuat pertahanannya di Laut China Selatan dengan mengamankan bantuan langsung dari milisi militer dan *People's Liberation Army* (PLA, yang merupakan organisasi sipil dengan tujuannya didirikannya adalah untuk paramiliter. (Kemhan, 2019). Meskipun milisi militer berpartisipasi dalam konflik sebagai aktor non-

negara, negara sepenuhnya mendukung upaya mereka untuk menegaskan kedaulatan di Laut China Selatan. PLA sangat penting untuk mempertahankan hak kedaulatan Tiongkok di Laut China Selatan. Angkatan Udara dan Angkatan Laut adalah dua cabang PLA. Aktor utama yang berperan dalam proses militerisasi yang berlangsung adalah *People's Liberation Army Navy* (PLAN). PLAN menawarkan dukungan operasional dan mengawasi kapal-kapal sipil atau milisi di perairan yang disengketakan. Selain itu, PLAN membentuk “lobi Angkatan Laut” untuk memengaruhi kebijakan luar negeri Tiongkok agar lebih agresif dalam masalah maritim. Selain itu, lobi ini didirikan untuk mempromosikan keseragaman dalam strategi militer Tiongkok di Laut China Selatan. (Yamaguchi, 2016). Tiongkok juga menggunakan strategi “A2/AD” atau *Anti-Access/Area Denial* untuk mencegah negara lain memasuki Laut China Selatan dan menghentikan operasi yang sedang berjalan. Faktanya, ini menunjukkan bahwa Tiongkok mencoba menciptakan zona penyangga yang meningkatkan risiko dan mempersulit kehadiran pasukan asing. (Dwiguna et al, 2019). Tindakan militer yang dilakukan Tiongkok di Laut China Selatan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pembangunan pulau buatan dengan fasilitas militer canggih, seperti landasan pacu. Instalasi rudal dan radar, serta penempatan kapal perang, telah menarik perhatian internasional dan menimbulkan kecemasan di antara banyak negara, khususnya di wilayah Laut China Selatan. Hal ini dengan jelas menunjukkan upaya Tiongkok untuk menggunakan kekuatan militer guna memperkuat klaimnya atas Laut China Selatan. Tiongkok telah mendirikan pangkalan militer permanen di tiga pulau utama. Pulau-pulau tersebut dilengkapi dengan peluncur rudal anti-kapal, sistem pertahanan udara, serta fasilitas penyimpanan amunisi, dan bahan bakar. (Johannes, 2023).

Upaya militerisasi Tiongkok di pulau-pulau buatan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas regional dan keamanan maritim, khususnya di Asia Tenggara, yang juga memiliki klaim atas sebagian perairan di Laut China Selatan, niscaya akan terdampak oleh upaya militerisasi Tiongkok. (Beckman, 2017). Meskipun sebelumnya telah banyak studi penelitian yang memuat pembahasan tentang konflik di Laut China Selatan dari sudut pandang sejarah atas klaim wilayah dan hukum internasional, yang memuat pembahasan tentang bagaimana militerisasi pulau buatan yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut China Selatan. Meski begitu, belum banyak penelitian yang mencakup diskusi yang secara khusus melihat implikasinya. Salah satu contohnya, yaitu pada penelitian jurnal milik Arthamevya Zherlindya Putri Darmawan dan Nabilla Kharisma Ardhaneswari tahun 2024 dengan judul “Konstelasi Geopolitik Tiongkok di Laut China Selatan: Studi Kasus Reklamasi dan Militerisasi Pulau Buatan oleh Tiongkok di Kepulauan Spratly”. Pada jurnal ini meneliti tentang tujuan Tiongkok melakukan reklamasi pulau buatan di Kepulauan Spratly, Laut China Selatan dengan

melakukan tindakan militerisasi. Penelitian tentang pembahasan yang ada pada jurnal ini memiliki kemiripan dengan jurnal yang diteliti oleh penulis, dimana memuat pembahasan tentang bagaimana Tiongkok melakukan tindakan militerisasinya terhadap pulau buatan yang ada di Laut China Selatan, seperti penggunaan kekuasaan milisi militer dan sebagainya. (Darmawan & Ardhaneswari, 2024). Namun, perbedaan penelitian yang ada pada jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis memuat pembahasan implikasi dari tindakan militerisasi yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap keamanan maritim secara kolektif.

Dengan demikian, penelitian tersebut bukan penelitian pertama yang memuat pembahasan tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Tiongkok dalam melakukan tindakan militerisasi pulau buatan di Laut China Selatan. Namun, kebaruan penelitian tersebut terletak pada fokus analisis terhadap implikasi strategis dari militerisasi yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap keamanan maritim negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Jurnal ini akan fokus mengkaji tentang bagaimana tindakan militerisasi tersebut memengaruhi tatanan keamanan maritim di Asia Tenggara yang langsung terdampak.

2. KAJIAN TEORITIS

Pada penelitian ini, untuk memahami dinamika kekuasaan, tindakan militerisasi oleh Tiongkok, dan ancaman terhadap Kawasan Asia Tenggara, diperlukan adanya pengimplementasian teori dalam hubungan internasional sebagai kerangka penting dalam menganalisis dinamika kekuasaan dan implikasi di tingkat kawasan. Dalam menganalisis tindakan militerisasi dan implikasinya terhadap keamanan maritim di Kawasan Asia Tenggara, tindakan Tiongkok tidak dapat dilepaskan dari adanya persaingan kekuatan dan kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, kajian teoritis analisis ini menggunakan Paradigma Realisme, Teori Keamanan Regional, dan Konsep Keamanan Maritim. Ketiga kerangka ini tentunya memberikan landasan yang dapat saling melengkapi dalam membedah isu tindakan militerisasi dan implikasinya terhadap keamanan maritim kawasan.

Paradigma Realisme

Paradigma utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Realisme, yang menjelaskan bahwa untuk mencapai kekuatan yang diinginkan dalam menghadapi struktur internasional yang tidak stabil, negara bertindak untuk melindungi kepentingan nasionalnya dengan memperluas kekuatannya. (Rosyidin, 2022). Realisme juga menjelaskan negara akan mempertahankan berbagai taktik agresif untuk memajukan kepentingan nasional dan tidak ada

otoritas tunggal yang mengatur hubungan internasional. Akibatnya, negara-negara terus berupaya untuk mengembangkan kemampuan militernya dan membuat aliansi untuk menghadapi ancaman eksternal. Hal ini sejalan tindakan Tiongkok, yang dimana Tiongkok telah memiliterisasi pulau-pulau buatan dan meningkatkan operasi militer di perairan yang disengketakan oleh banyak negara dalam upaya menegakkan klaim teritorialnya. Tentu saja, hal ini menunjukkan upaya Tiongkok sebagai pemain utama untuk mempertahankan haknya untuk menentukan nasib sendiri di Laut China Selatan juga kepentingan strategis yang dapat memperkuat kekuasaannya yang dominan.

Teori Keamanan Regional Kompleks

Keadaan geografis suatu negara memengaruhi keamanan regional yang kompleks. Suatu kawasan merupakan subsistem hubungan yang penting dan berbeda antara kelompok negara yang berdekatan secara geografis. Ketika keamanan nasional tidak sepenuhnya tercapai, keamanan regional mengacu pada upaya menyeluruh. (Buzan & Waever, 2003). Menurut keamanan regional yang kompleks, pengembangan kelompok berbasis regional sangat berdasar pada ketergantungan keamanan. Tingkat analisis yang memisahkan unit dari sistem global secara keseluruhan ditangani oleh keamanan regional kompleks. Unit-unit individual, seperti pemimpin negara atau pejabat yang bertugas membuat keputusan berkonsentrasi pada pendapat dan pilihan individu. (Friiz, 2021).

Dalam keamanan regional kompleks, negara merupakan aktor utama karena negara membangun kawasan dan mengendalikan proses hubungan internasional, serta memainkan peran dalam sistem keamanan regional dan menggunakan ranah militer dan politik sebagai forum utama. Selain itu, kehadiran *Amity* (persahabatan) dan *Enmity* (permusuhan) juga berkontribusi pada pembangunan keamanan regional kompleks. (Suryanti, 2021). *Amity* adalah hubungan antarnegara yang bermula dari persahabatan dan harapan untuk membantu satu sama lain. Sementara *Enmity*, berasal dari banyak hal yang unik, seperti sengketa perbatasan, kepentingan etnis, kelompok ideologi, dan peristiwa historis yang baik atau buruk, serta pembagian kekuasaan di antara negara atau wilayah tertentu.

Konsep Keamanan Maritim

Keamanan maritim adalah sesuatu yang merujuk pada upaya yang komprehensif melalui tindakan pencegahan yang responsif terhadap seluruh wilayah perairan suatu negara, yang meliputi hal yang taktis, yang meliputi ekosistem dan kualitas lingkungan laut, infrastruktur maritim, dan perairan nasional dari ancaman dan tindakan ilegal. (Feldt, Roell, et

al., 2013). Keamanan maritim tidak hanya melindungi kedaulatan dan integritas wilayah dari bahaya konvensional, seperti serangan dan pelanggaran militer yurisdiksi laut, tetapi juga melindungi wilayah maritim dari ancaman transnasional. Tindakan ilegal ini meliputi penangkapan ilegal, yang dimana penangkapan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dalam *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, pelanggaran batas wilayah, aktivitas militer, dan kerusakan lingkungan laut, yang dapat memberi implikasi terhadap stabilitas kawasan maritim. (Yani et al., 2017). Ketika kepentingan militer dan nonmiliter suatu negara di laut tidak menimbulkan ancaman terhadap negara tersebut, dikatakan memiliki keamanan maritim. Pelanggaran kedaulatan negara, ketidakpatuhan terhadap hukum nasional dan internasional, penggunaan sumber daya laut secara ilegal, dan kegiatan ilegal, seperti penyelundupan orang dan barang melalui rute laut merupakan beberapa ancaman tersebut. Oleh karena itu, keamanan maritim mencakup pertahanan menyeluruh terhadap berbagai fitur strategis terkait laut yang menjunjung tinggi kepentingan dan kedaulatan nasional. Menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasi maritim, menjaga sumber daya laut untuk meningkatkan ekonomi nasional, dan memastikan keselamatan masyarakat yang bergantung pada sektor maritim merupakan tujuan utama keamanan maritim. (Guricci & Seniwati, 2024)

3. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis militerisasi pulau-pulau buatan dan implikasinya terhadap keamanan maritim di Kawasan Regional Asia Tenggara, penelitian ini utamanya menggunakan metode kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan. Metode ini melibatkan penelaahan dan pengumpulan, serta menganalisis sumber-sumber sekunder yang relevan, termasuk dokumen kebijakan resmi negara, buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel ilmiah untuk memahami teori, konsep, dan metode implementasi yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Tiongkok, militerisasi wilayah maritim, serta dinamika keamanan kawasan Asia Tenggara dengan fokus utama kajian ini adalah pada bagaimana tindakan Tiongkok dalam mempersenjatai pulau buatan di wilayah yang disengketakan akan berdampak terhadap stabilitas keamanan maritim kolektifnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Pulau Buatan Tiongkok di Laut China Selatan

Tiongkok telah menyelesaikan pembangunan sebuah pulau di Laut China Selatan yang merupakan tugas khusus bagi negaranya untuk menguraikan strategi dan rencana geopolitik bagi Tiongkok dalam memperkuat posisinya di wilayah yang diperebutkan. Pembangunan

pulau besar-besaran di Laut China Selatan dimulai pada tahun 2014 hingga 2016, dimana mereklamasi terumbu karang dan mengubahnya menjadi pulau yang dilengkapi dengan infrastruktur moder, seperti sistem radar, hanggar pesawat, peluncur rudal, dan landasan pacu. Pulau-pulau yang dibangun Tiongkok ini terletak pada Kepulauan Spratly, yang seringkali menjadi titik konflik antarnegara Asia. Pembangunan pulau ini mencerminkan kemampuan militer untuk mengendalikan wilayah Laut China Selatan yang strategis.(Wicaksono, et al., 2024). *The United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) menyatakan bahwa sekitar 80 persen perdagangan di dunia melalui laut dengan 60 persen diantaranya melalui Asia. (UNCTAD, 2015). Laut China Selatan juga jalur yang dilalui lebih dari separuh minyak yang berasal dari Timur Tengah, seperti Irak, Arab, dan Uni Emirat Arab (UEA). Negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan telah lama sangat beruntung pada wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya karena perairan Laut China Selatan membentang dari Selat Hormuz di Teluk Persia hingga Selat Malaka.

Lokasi strategis Laut China Selatan berdampak pada kebijakan politik Tiongkok karena sangat penting bagi keamanan ekonomi negaranya. Negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini bergantung pada laut untuk lebih dari 60 persen perdagangannya. Perdagangan Tiongkok di Laut China Selatan bernilai 874 miliar dolar. (Pusparisa, 2020). Selain itu, berdasarkan data Rystad Energy tahun 2023, Laut China Selatan memiliki gas alam berjumlah sekitar 40,3 triliun kaki kubik dan barel minyak sejumlah 3,6 miliar, yang dapat membuat Tiongkok sangat diuntungkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya Tiongkok dalam mengeksplorasi secara signifikan, dimana berdasarkan data yang ada, Tiongkok berhasil mengeksplor 34 persen minyak dan 66 persen gas alam.

Berdasarkan kepentingan politik dan ekonomi strategis yang terkait erat dengan kelimpahan sumber daya alam dan lokasi strategis yang menguntungkan Tiongkok, yang mendorong Tiongkok untuk melakukan reklamasi terumbu karang menjadi pulau-pulau buatan di perairan tersebut, yang meliputi Fiery Cross Reef, Subi Reef, Hughes Reef, Mischief Reef, Cuarteron Reef, dan Johnson Reef. (Darmawan, 2024). Pembangunan ini telah menjadi salah satu tonggak penting dalam transformasi Laut China Selatan menjadi wilayah dengan kehadiran strategis yang semakin dominan oleh Tiongkok.

Tindakan Militerisasi Tiongkok di Pulau Buatan Laut China Selatan

Dinamika geopolitik telah menjadi lebih kompleks dalam beberapa tahun terakhir karena ketegangan di Laut China Selatan telah meningkat. Wilayah ini telah berkembang menjadi ladang untuk memproyeksikan kekuatan militer. Salah satu alasan utama

meningkatnya ketegangan adalah militerisasi pulau-pulau buatan oleh Tiongkok. Hal ini menunjukkan upaya Tiongkok untuk menegaskan klaim historisnya berdasarkan Prinsip *Nine Dash Line* dan tujuan strategisnya untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah pengaruh di bawah kendali militer negaranya langsung. (Djelantik, 2021).

Tiongkok telah membangun lintasan pacu yang panjangnya 3.000 meter di ketiga lokasi tersebut. Landasan pacu ini memiliki instalasi radar dan komunikasi canggih, *Surface to Air Missile* (SAM), dan sistem pertahanan anti-kapal. Pulau-pulau buatan ini dibangun untuk mendukung operasi militer jangka panjang dan meningkatkan jangkauan Angkatan Laut dan Udara Tiongkok, sebagaimana dibuktikan oleh keberadaan hanggar pesawat dan sistem logistik militer lainnya. (Johannes, 2023). Tindakan Tiongkok dalam mengembangkan infrastruktur militer yang luas dan sangat maju di tiga wilayah yaitu, Mischief Reef, Subi Reef, dan Fiery Cross Reef membuat militerisasi ini tergambar jelas. Menurut laporan dari *Asia Maritime Transparency Initiative* (AMTI), Subi Reef telah diubah menjadi fasilitas militer strategis. Saat ini, pulau buatan tersebut menjadi rumah bagi sejumlah bangunan penting, termasuk mercusuar besar, yang berfungsi ganda sebagai pos pengawasan maritim dan navigasi sipil. Subi Reef dipersiapkan juga untuk pangkalan udara utama, yang dapat menampung lima hanggar besar dan dua puluh jet tempur. Lapangan terbang sepanjang lebih dari 3.000 meter tersebut telah beroperasi sejak awal 2016, yang hingga saat ini menampung berbagai pesawat militer, termasuk pesawat pengintai dan pembom jarak jauh. (Sudrajat, 2022). Salah satu kawasan klaim laut terpenting dan strategis di Kepulauan Spratly yang saat ini dimiliki oleh Tiongkok adalah Fiery Cross Reef. Tiongkok mulai menduduki Fiery Cross Reef pada tahun 1988. Namun, pulau karang kecil itu telah mengalami reklamasi yang signifikan, yang hingga saat ini mencapai hampir tiga kilometer persegi. (Darmawan, 2024). Tiongkok secara berkala memperluas wilayah tersebut tanpa pengawasan internasional yang ketat karena lokasinya yang terpencil dan cakupan yang terbatas. Pada akhir 2016, area reklamasi Fiery Cross Reef telah berkembang menjadi 2.740.000 meter persegi. (SCMP, 2016). Instalasi militer terancang dan terlengkap di Laut China Selatan ada di Fiery Cross Reef, dimana tiga pilar utama kekuatan militer modern, komunikasi, pertahanan, dan kemampuan tempur didukung oleh berbagai fasilitas di pulau buatan ini. Fiery Cross Reef lebih dari sekadar pangkalan pendukung, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai instalasi pertahanannya, termasuk radar dan sistem komunikasi yang canggih.

Pulau buatan ini memiliki banyak fasilitas komunikasi yang mendukung kegiatan militer Tiongkok. Pulau ini menjadi rumah bagi stasiun Satuan Komunikasi (SATKOM) yang memfasilitasi data dan komunikasi yang andal antara pulau-pulau buatan lainnya dan daratan

Tiongkok, serta bertindak sebagai pusat komunikasi strategis untuk koordinasi militer Tiongkok. *Troposcatter Station North* dan *the Island's High Frequency (HF) Monopole Array* pulau tersebut, yang terdiri dari enam antena log-periodik horizontal dan empat antena dipol setengah gelombang memiliki tujuan berbeda. Troposcatter Utara memfasilitasi komunikasi antara pulau-pulau buatan seperti Subi Reef dengan menggunakan gelombang mikro yang dipantulkan oleh troposfer untuk mengirimkan sinyal pada jarak yang lebih jauh dari garis pandang langsung. Sementara *HF Monopole Array* memungkinkan transmisi yang stabil pada jarak yang jauh dalam berbagai kondisi cuaca dan pengawasan elektronik untuk berkomunikasi secara efektif dalam waktu nyata. (Dahm, 2020). Banyaknya sensor dan sistem pemantauan, membuat Fiery Cross Reef menjadi lokasi pertahanan militer terancang karena tingginya efektivitas untuk mengidentifikasi aktivitas udara dan laut di wilayah yang sangat luas. Tidak hanya itu, *Over the Horizon Radar (OTH Radar)* juga ada di pulau tersebut, dimana OTH Radar menggunakan gelombang radio berfrekuensi tinggi yang dipantulkan oleh ionosfer untuk mendeteksi target yang berjarak ribuan kilometer, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman jauh sebelum menjauh zona pertahanan Tiongkok. (Chang, 2021). Lebih jauh lagi, pulau ini dilengkapi dengan *Electronic Intelligence (ELINT)* yang dapat memantau langsung aksi militer negara lain di area tersebut secara langsung. Sinyal elektronik yang datang dari militer asing dapat dicegat oleh ELINT untuk digunakan dalam sistem navigasi dan komunikasi. (Asia Maritime Transparency Initiative, 2017). Sementara itu, kemampuan pulau ini diperhitungkan dalam strategi militer Laut China Selatan milik Tiongkok. Ada 24 hanggar pesawat tempur di pulau ini yang dapat menampung armada jet tempur, seperti J-11 dan J-16, serta pesawat pengintai KJ-500 dan pesawat nirawak militer strategis, juga memiliki sistem rudal pertahanan udara HQ-9B. (Asia Maritime Transparency Initiative, 2017). Kapasitas jangkauan hingga 160 mil laut (296 kilometer), sistem ini dapat mengidentifikasi dan menghancurkan target udara, rudal jelajah, dan pesawat tempur. Instalasi ini menunjukkan keinginan China untuk mempertahankan kehadiran militer jangka panjang dan memproyeksikan kekuatan di seluruh Asia Tenggara dan sekitarnya. (Kemhan, 2019).

Implikasi terhadap Keamanan Maritim Negara-negara Asia Tenggara

Laut China Selatan merupakan kawasan yang strategis karena merupakan jalur pelayaran internasional utama, serta kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati bawah laut. Laut China Selatan diklaim bertumpang tindih dengan beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Militerisasi yang dibangun oleh Tiongkok, seperti landasan pacu, hanggar pesawat, sistem radar, dan peluncur

rudak yang juga melibatkan warga sipil, telah menimbulkan adanya ketegangan geopolitik kawasan. (Hidayat et al., 2024).

a. Vietnam

Menurut peta, arsip, dan Pemerintahan Vietnam, Vietnam merupakan salah satu negara pesisir di Asia Tenggara yang secara fisik berbatasan dengan Laut China Selatan dan memiliki klaim kuat atas wilayah tersebut. Klaim ini didasari oleh Hukum Laut UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa Vietnam berhak atas ZEE sejauh 200 mil laut dari pantai dan dapat memperluas landas kontinennya, jika memenuhi syarat geologis dan geografis. (United Nation Convention on the Law of the Sea, 1982). Namun, telah terjadi guncangan terhadap stabilitas keamanan maritim Vietnam sejak Tiongkok memiliterisasi Laut China Selatan. Ruang operasional ZEE Vietnam terdampak militerisasi itu, yang juga mencakup instalasi dan fasilitas militer seperti radar, sistem rudal darat dan udara, serta pangkalan militer laut dan udara. Adanya penempatan pangkalan kapal patroli laut yang sama, Tiongkok seringkali melakukan pengintaian terhadap patroli laut Vietnam, yang masih seharusnya masih menjadi bagian dari ZEE Vietnam. Akibatnya negara-negara yang bekerja sama dengan Vietnam dalam industri gas alam dengan secara terpaksa berhenti. Akibatnya, Vietnam kini kehilangan investasi jangka panjangnya. (Ariansah et al., 2023).

Selain itu, militerisasi Tiongkok menghambat kebebasan navigasi kapal dagang dan tanker Vietnam karena adanya radar militer Tiongkok dan patroli laut yang dengan sengaja dapat memperlambat rute perdagangan internasional dan menimbulkan ancaman bagi jalur pelayaran komersial yang melewati ZEE Vietnam. Keterbatasan ruang gerak bagi kapal-kapal nelayan Vietnam yang sering melintasi ZEE Vietnam juga turut mengalami penurunan drastis perekonomiannya. Akibatnya, ekonomi maritim Vietnam pun terpuruk. (Ariansah et al., 2023). Pengawasan maritim Vietnam terhadap aktivitas ilegal apapun yang melintasi perairan teritorial dan ZEE Vietnam juga sangat terganggu oleh militerisasi yang sedang berlangsung.

b. Filipina

Upaya militerisasi Tiongkok, seperti yang dilakukan di Fiery Cross Reef telah berdampak langsung terhadap Filipina, khususnya terkait kedaulatan maritim atas wilayah ZEE yang secara tegas diatur oleh Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982. Secara geografis, Fiery Cross Reef merupakan pulau yang hanya berjarak 200 mil laut dari pantai Filipina. Tentunya, Filipina memiliki hak tunggal untuk menyelidiki, mengeksplorasi, dan mengawasi sumber daya bawah lautnya. Selain melanggar hukum

internasional, militerisasi Tiongkok mengganggu tata kelola dan keamanan maritim Filipina. Selain itu, reklamasi ini juga dilengkapi oleh fasilitas militer yang *offensive*, sehingga dapat melakukan pengawasan udara yang luas, khususnya dalam melacak pergerakan pesawat milik Filipina, seperti Kong Jing KJ-500 juga memiliki helikopter militer Change Z-8 berkapasitas tinggi yang dapat mengangkut pasukan dan logistik militer. Hal ini memungkinkan Tiongkok mengirim secara terus-menerus fasilitas militernya. Tidak hanya itu, Tiongkok juga menghadirkan sistem rudal anti-kapal YJ-128 dan sistem pertahanan udara HQ-98. Hal ini menjadikan wilayah udara dan teritorial tersebut sebagai zona anti-akses yang membahayakan stabilitas ekonomi nasional Filipina. Akibat intimidasi oleh kapal militer dan aktivitas militer Tiongkok lainnya, kapal penangkap ikan Filipina tidak lagi beroperasi di wilayah tersebut, yang menunjukkan implikasi langsung dari fasilitas militer, seperti helikopter militer, pesawat militer, sistem rudal, dan pertahanan udara lainnya terhadap ekonomi maritim negara Filipina yang terbatas kendali atas laut teritorialnya. (Gofa & Fitriani, 2025).

Adanya peningkatan kehadiran militer di ZEE Filipina menyebabkan Filipina tidak dapat menegakkan hukum maritimnya. Selain itu, militerisasi yang dilakukan oleh Tiongkok juga memaksa Filipina untuk melakukan pelayaran melalui rute yang lebih jauh dan pengawasan ketat, yang secara alami dapat meningkatkan biaya logistik maritim dan memperlambat rantai pasokan. (Gofa & Fitriani, 2025).

c. **Brunei Darussalam**

Militerisasi Tiongkok di Laut China Selatan juga dilakukan di wilayah yang berdekatan dengan klaim landas kontinen dan ZEE Brunei Darussalam. (Pramadiansyah, 2022). Strategi matang Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di Laut China Selatan ditunjukkan di Subi Reef dan Fiery Cross Reef. Landasan pacu sepanjang 3.250 meter, hanggar, sistem *anti-logging*, radar pengintai, dan dermaga dibangun di pulau ini. Fiery Cross Reef memiliki pertahanan yang sangat termiliterisasi permanen. Radar dan peralatan militer lainnya dapat menjangkau dan mendeteksi secara tepat dan jauh ke dalam perairan ZEE Brunei Darussalam. Akibatnya, Brunei Darussalam tidak dapat menegakkan klaim teritorialnya karena Tiongkok dapat secara sistematis memantau aktivitas kapal dagang, kapal nelayan, dan patroli laut. (Gofa & Fitriani, 2025).

Selain itu, Subi Reef memiliki fasilitas penerbangan dengan landasan pacu dan enam helipad yang mengawasi secara ketat. Pada saat yang sama, Fiery Cross Reef memiliki fasilitas militer yang dapat mendukung transportasi militer dan pesawat dalam proyeksi kekuatan yang kuat. Akibatnya, meskipun Brunei Darussalam masih dalam

ZEE-nya pun tetap menjadi sasaran pengawasan ketat dan dicegat secara terpaksa oleh Tiongkok dan memiliki risiko serangan mendadak dan tingkat tinggi jika memasuki zona klaim sepihak Tiongkok. Hal ini membuat, Brunei Darussalam tidak mendapatkan haknya sendiri di wilayah teritorialnya. (Sands, 2015). Tiongkok juga mengganggu eksplorasi sumber daya di landas kontinen Brunei Darussalam melalui *Anti-Access/Area-Denial*, yang secara jelas melanggar hak kedaulatan Brunei Darussalam.

d. Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang turut mengklaim atas sebagian wilayah Laut China Selatan, khususnya pada wilayah yang juga diklaim oleh Tiongkok secara sepihak melalui *Nine Dash Line*. Laut China Selatan. Melimpahnya sumber daya alam, terutama minyak dan gas mendorong Malaysia untuk terus mengeksplor energi, terutama gas alam cair dari ladang gas di lepas Pantai Sarawak. Kawasan perairan yang dimiliterisasi oleh Tiongkok terletak di dekat Pelabuhan ekspor Bintulu dan fasilitas eksplorasi gas Luconia Shoals. Malaysia menanggapi dengan tegas dengan mengirimkan pernyataan kepada PBB yang secara tegas membantah penolakan dan klaim historis Tiongkok. (Parameswaran, 2015). Untuk menegaskan landas kontinennya, Malaysia mengulangi itndakan ini pada Desember 2019 dengan kembali mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Lokasi militerisasi yang berada dekat dengan ZEE Malaysia, khususnya wilayah landas kontinen Sabah dan Sarawak memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan maritim Malaysia. Tiongkok secara agresif melakukan pengembangan infrastruktur militer pada ketiga pulau tersebut, termasuk landasan pacu sepanjang tiga kilometer, hanggar untuk pesawat militer, stasiun jangkar yang canggih, dan dermaga besar. Pulau-pulau ini dilengkapi sistem canggih, seperti rudal anti-kapal YJ-12 dan YJ-62, serta rudal permukaan ke udara HQ-9 dan HQ-98. Kemampuan pertahanan udara dan laut Tiongkok tidak diragukan lagi. Meskipun demikian, hal ini secara langsung memengaruhi kebebasan navigasi kapal militer dan sipil Malaysia. Tentu saja, hal ini melanggar Hukum Laut UNCLOS 1982 mengenai stabilitas perairan yang dikontrol langsung oleh Malaysia dan keselamatan pelayaran. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatan kapal tanker, mengakibatkan biaya tambahan dalam bentuk premi asuransi, memerlukan penggunaan pengawasan keamanan maritim, dan ekonomi nasional. (Gofa & Fitriliani, 2025). Keamanan dan pertahanan nasional Malaysia juga dipengaruhi oleh militerisasi Tiongkok. Malaysia terus-menerus mendapat tekanan untuk memperkuat kemampuan maritim dan pengawasannya. Nmaun, tindakan

Malaysia terbatas karena anggaran pertahanannya yang kurang mencukupi, yang menyebabkan tertinggalnya dalam hal ekonomi. Akibatnya, makin meluasnya kesenjangan Tiongkok dan Malaysia.

Lebih jauh lagi, ketidakseimbangan ekologis di kawasan tersebut yang merupakan sumber kehidupan bagi nelayan Malaysia disebabkan oleh militerisasi Tiongkok. Ekosistem terumbu karang Malaysia yang berfungsi sebagai habitat bawah laut telah dirusak oleh adanya reklamasi. Hasil tangkapan nelayan Malaysia tidak diragukan lagi telah menurun sebagai akibat dari kerusakan lingkungan ini. Lebih jauh lagi, keadaan sosial ekonomi masyarakat pesisir Malaysia yang bergantung pada industri perikanan untuk mata pencaharian mereka telah memburuk karena kerusakan lingkungan, yang juga telah meningkatkan perselisihan atas sumber daya laut. Malaysia juga telah kehilangan kebebasan strategisnya untuk menggunakan semua sumber daya alam di perairan yang secara sah merupakan akibat dari militerisasi Tiongkok.

Dengan demikian, tindakan yang dilakukan Tiongkok menggambarkan bahwa tindakannya bukan lagi sebagai strategi pertahanan atas wilayah klaim kedaulatannya tetapi sebagai kekuatan untuk melemahkan pengawasan negara-negara di wilayah perairan Laut China Selatan, khususnya Kawasan Asia Tenggara atas sumber daya alam, ZEE, dan landas kontinennya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pulau-pulau buatan di Laut China Selatan yang dibangun oleh Tiongkok memberikan implikasi keamanan maritim secara substansial dan menghadirkan ketidakstabilan kawasan regional yang dibutuhkan oleh negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, serta ketidakpastian jaminan untuk mengelola wilayah laut yang diakui secara hukum. Selain menjadi langkah yang diperhitungkan untuk memperkuat strategi pertahanan militer dan politiknya di Laut China Selatan, kebijakan Tiongkok juga menghadirkan ancaman bagi negara-negara Asia Tenggara yang turut mengklaim atas wilayah perairan Laut China Selatan. Selain itu, tindakan Tiongkok juga menegasikan tatanan hukum internasional. Oleh karena itu, Penulis menyarankan agar negara-negara di Kawasan Asia Tenggara meningkatkan kemampuan pengawasan maritim nasional dan memperkuat diplomasi maritim secara kolektif juga mengusulkan agar organisasi regional lebih serius dan mengikat dalam menangani permasalahan yang ada.

DAFTAR REFERENSI

- Ariansah, F., Malik, F. A., Saphira, M., Erviana, V., & Antoni, H. (2023). Konflik antara China dengan Vietnam atas Laut China Selatan berdasarkan perspektif hukum laut internasional. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 518–528.
- Asia Maritime Transparency Initiative. (2017). China's Big Three near completion. Center for Strategic and International Studies.
- Aulia, A., Putra, A. P., Aryadi, A. W., et al. (2023). Pesona kekayaan alam: Sumber konflik di kawasan Laut China Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir (JULIA)*, 10(2), 240.
- Beckman, R. (2013). The UN Convention on the Law of the Sea and the maritime disputes in the South China Sea. *American Journal of International Law*, 1, 143.
- Beckman, R. (2017). China's "island-building" in the South China Sea: Implications for regional security.
- Bolkiah, A. W., & Usni, A. S. (2023). Respons China terhadap kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa)*, 3(2), 48.
- Buzan, B., & Waever, O. (2003). *Regions and powers: The structure of international security*. Cambridge Studies in International Relations.
- Chang, F. K. (2021). China's maritime intelligence, surveillance, and reconnaissance capability in the South China Sea. *Foreign Policy Research Institute (FPRI)*.
- Dahm, J. M. (2020). A survey of technologies and capabilities on China's military outposts in the South China Sea: Hardened infrastructure, counter-reconnaissance, and battlespace environment management.
- Darmawan, A. Z. P., & Ardhaneswari, N. K. (2024). Konstelasi geopolitik Tiongkok di Laut China Selatan: Studi kasus reklamasi dan militerisasi pulau buatan oleh Tiongkok di Kepulauan Spratly. *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban*, 3(2), 51.
- Djelantik, S. (2021). Kekuatan nasional Tiongkok dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 302–303.
- Dwiguna, R. A., & Rofii, M. S. (2019). Rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok di Laut China Selatan dan pengaruhnya terhadap Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 2(2).
- EIA. (2013). The South China Sea is an important world energy trade route. U.S. Energy Information Administration.
- Enercom. (2018). Middle East's oil depends on South China Sea to reach Asian customers. *Oil & Gas 360*.
- Feldt, L., Roell, D. P., et al. (2013). *Maritime security – Perspectives for a comprehensive approach*. Berlin: ISPSW.

- Friiz, K. (2021). Analyzing security subregions: Forces of push, pull, and resistance in Nordic defence cooperation. *Journal of Global Security Studies*, 6(4).
- Gofa, A. G., & Fitriliani, Y. (2025). Sengketa pembangunan pangkalan militer China di Kepulauan Spratly antara China dan Filipina berdasarkan UNCLOS 1982. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 7(2), 155–170.
- Goh, E. (2005). Meeting the China challenge: The U.S. in Southeast Asian regional security strategies. East-West Center Washington.
- Goldstein, J. S. (2003). *International relation* (5th ed.). London: Longman Publishing.
- Guricci, M. F., & Seniwati. (2024). Strategi keamanan maritim di Asia Tenggara: Kerja sama diplomasi maritim di ASEAN. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 132–133.
- Hidayat, A. R., & Alifah, N. (2024). Sengketa Laut China Selatan: Analisis realis terhadap perebutan kekuasaan, respon regional, dan implikasi geopolitik. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(2), 588–589.
- Johannes, R. (2023). Peningkatan ketegangan geopolitik di Laut China Selatan. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(4), 214.
- Kementerian Pertahanan. (2019). Eksistensi TNI dalam menghadapi ancaman militer dan nir militer multidimensional di era milenial. *Media Informasi Kementerian Pertahanan (WIRA)*.
- Khairulshah, K. (2025). Dampak kebijakan luar negeri China di Laut China Selatan terhadap stabilitas politik dan keamanan kawasan Asia Tenggara tahun 2020–2023. *Diplomacy and Global Security Journal*, 2(1), 87–98.
- Parameswaran, P. (2015). Playing it safe: Malaysia's approach to the South China Sea and implications for the United States. *Maritime Strategy Series*, February, 1–14.
- Pramadiansyah, A. M. F. (2022). Analisis agresivitas Republik Rakyat Tiongkok di Laut China Selatan terhadap keamanan regional Asia Tenggara (Skripsi Sarjana, Universitas Hasanuddin).
- Pusparisa, Y. (2020). Tiongkok kuasai ekspor jalur Laut Cina Selatan. *Databoks*.
- Ramon, A. A. (2022). UNCLOS dan Indonesia: Refleksi menjelang 40 tahun pembentukan Konvensi PBB Tahun 1982. Retrieved from <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id>
- Rosyidin, M. (2022). Realisme versus liberalisme: Suatu perbandingan pragmatis. *Indonesian Perspective*, 7(2), 136–138.
- Sands, G. (2015). Brunei, silent claimant in the South China Sea. *Foreign Policy Association*.
- SCMP. (2016). *South China Morning Post*.
- Sudrajat, I. (2022, May 12). Tiongkok terus bangun fasilitas di Subi Reef. *Koran Jakarta*.

- Suryanti, B. T. (2021). Pendekatan neorealis terhadap studi keamanan nasional. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 30–31.
- UNCTAD. (2015). *Review of maritime transport 2015*.
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*.
- Valencia, M. J. (2017). The South China Sea: A sea of trade, a sea of fisheries. *Ocean Development & International Law*, 48(1), 1–17.
- Wicaksono, B. S., Supriyadi, A. D., et al. (2024). Menuju laut bebas hegemoni Laut Cina Selatan pada geopolitik kritis keamanan di era globalisasi. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 48(8), 3027.
- Yamaguchi, S. (2016). Strategies of China's maritime actors in the South China Sea. *China Perspectives*, 2016(3), 23–31.
- Yani, Y. M., et al. (2017). *Pengantar studi keamanan*. Malang: Intrans Publishing.